



Laporan Triwulan 4 **KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK** **2025**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Triwulan 4 Kegiatan pelayanan informasi publik ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada periode Oktober hingga Desember tahun 2025, yang mencakup berbagai penerimaan permohonan dan pemberian informasi publik kepada Masyarakat yang diterima melalui semua saluran penerimaan informasi seperti website PPID, e-form, email dll.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik maupun penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	5
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT.....	7
III.1 Permasalahan	7
III.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
LAMPIRAN	9

BAB I PENDAHULUAN

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam mengelola, menyediakan, dan memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelayanan informasi publik oleh PPID bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat keterbukaan publik, serta memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun strategis.

Laporan kegiatan pelayanan informasi publik triwulan 4 tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi terkait kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan, mengidentifikasi hambatan sekaligus memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa yang akan datang.

BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Layanan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi publik melalui PPID menggunakan beberapa saluran yakni website PPID, email/e-form, tatap muka langsung maupun menggunakan sarana chatting/whatsapp.

Pada triwulan 4 tahun 2025, PPID BBRSEKP telah menerima 1(satu) permohonan informasi melalui website PPID KKP dan 4 (empat) permohonan informasi melalui email/e-form dan 1 (satu) permohonan informasi melalui chat/WhatsApp.

Tabel 4 Permohonan Informasi pada TW 4, 2025

No	Kanal Informasi	Jumlah Permohonan
1	Website PPID	1
2	Email/E-form	4
3	Chat/Whatsapp	1

PPID BBRSEKP pada triwulan 4 menerima dan melayani 1 permohonan informasi melalui website PPID yakni tentang salinan revisi permenkp nomor 33 tahun 2021 dengan kode permohonan 1553/PPIDKKP-PI/XI/2025. Kepada pemohon disampaikan bahwa permohonan informasi tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena pertanyaan yang diajukan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan disarankan agar mengajukan permohonan ulang ke Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Layanan informasi atas buku-buku terbitan BBRSEKP sebanyak 4 (empat) permohonan yakni 3 (tiga) buku dengan judul “Sketsa Kampung Nelayan” dan 1 (satu) buku berjudul “Jejak Inspiratif”.

Table 5 Permohonan informasi Buku Terbitan BBRSEKP Triwulan 4 Tahun 2025

No	Judul Buku	Jumlah Pemohon
1	Sketsa Kampung Nelayan	3
2	Jejak Inspiratif	1
Jumlah		4

Sedangkan 1 permohonan informasi melalui media whatsapp terkait dengan informasi magang di BBRSEKP.

BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

III.1 Permasalahan

Selama triwulan 4, pelaksanaan pelayanan informasi publik menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Permasalahan ini diidentifikasi dari berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, hingga teknis operasional.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni kurangnya penguasaan daftar informasi publik dan tidak adanya petugas khusus yang melayani permohonan informasi secara *fulltime* sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam pelayanan.
2. Keterbatasan Sarana Prasarana seperti jaringan internet yang seringkali mengalami kendala teknis yang mengakibatkan terhambatnya dalam memberikan respon dan efisiensi pelayanan. Jaringan VPN yang disediakan KKP sering kali bermasalah ketika digunakan.
3. Sistem pengelolaan database informasi yang masih belum terintegrasi secara optimal mengakibatkan pencarian dan penyediaan data memerlukan waktu yang lebih lama.
4. Aspek Teknis dan Operasional yakni belum optimalnya pembaharuan informasi public secara berkala. Hal ini menyebabkan data yang disajikan tidak selalu terkini.

III.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, berikut adalah beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

1. Mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi seluruh petugas pelayanan informasi tentang cara menyusun daftar informasi publik.
2. Mengembangkan atau memutakhirkan sistem database yang dapat mengintegrasikan seluruh data dan informasi publik secara digital. Hal ini akan mempermudah petugas dalam mencari, menyimpan, dan menyajikan informasi.
3. Menyusun jadwal rutin untuk pemutakhiran informasi publik secara berkala. Menunjuk penanggung jawab untuk setiap jenis informasi yang harus diperbarui, sehingga data yang disajikan selalu akurat dan terkini.

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan, kegiatan pelayanan informasi publik pada periode ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini menunjukkan komitmen kuat kami dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.

Selama periode ini, kami telah berhasil meningkatkan jumlah permohonan informasi yang ditangani secara efektif dan responsif. Berbagai inovasi, seperti optimalisasi kanal permohonan online dan pembaruan informasi secara berkala, telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas layanan.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga mengungkap beberapa tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia dan perlunya penyempurnaan sistem pengelolaan data.

LAMPIRAN

1. Tabel permohonan informasi buku terbitan BBRSEKP Triwulan

No	Tgl	Nama	Instansi	Informasi Yang Diminta	Kode Permohonan
1	2 Oktober 2025	Miranda	KKP	Informasi no HP untuk bertanya terkait magang di BBRSEKP	01/PPID-BBRSEKP/X/2025
2	17 Oktober 2025	Muh. Akhsan	Kantor Kelurahan Akkajeng	meminta Buku terbitan BBRSEKP dengan judul "Sketsa Kampung Nelayan	02/PPID-BBRSEKP/X/2025
3	30 Oktober 2025	Denny B. Mochran	CTC	terbitan BBRSEKP dengan judul "Sketsa Kampung Nelayan	03/PPID-BBRSEKP/X/2025
4	30 Oktober 2025	Denny B. Mochran	CTC	meminta Buku terbitan BBRSEKP dengan judul "Jejak Inspiratif	04/PPID-BBRSEKP/X/2025
5	24/11/2025	Mayang	Universitas Brawijaya	meminta Buku terbitan BBRSEKP dengan judul "Sketsa Kampung Nelayan	01/PPID-BBRSEKP/XI/2025
6	12/11/2025	Sijbrand Albrecht Peeters	Griya Semanggi no. 3, Mataram, Lombok	Salinan terkini terkait draft revisi Permen KKP No. 33 tahun 2021	02/PPID-BBRSEKP/XI/2025